

**EFEKTIVITAS PELAKSANAAN TUGAS LEMBAGA PEMBERDAYAAN  
MASYARAKAT (LPM) DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI DESA  
BITUNURIS KECAMATAN SALIBABU KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD**

**YOYO BULELE**

**M. S. Pangkey**

**W. Y. Rompas**

**ABSTRACT**

Community Empowerment is essentially a process of growth and development of the power of the community to be involved in various aspects of development in an area so the end goal is the community's independence, enable and develop the ability to advance themselves toward a better life in a balanced way. Thus in doing further research on the effectiveness of the execution of tasks in Planning Development LPM Bitunuris Village District of Salibabu Talaud Islands. This research is qualitative, then according to this study data analysis techniques are qualitative descriptive analysis.

Based on the results it can be concluded that the effectiveness of the implementation of the LPM tasks in development planning in the Village Bitunurissubdistrict Salibabu Talaud Islands is already good; in other words, the task of the LPM in rural development planning in the Village District of Salibabu Bitunuris Talaud Islands can be implemented quite effectively. However, further increase the available resources both human and natural sumberdaya that can be carried out in their development planning with better.

***Key words :Effectiviness, Task LPM, Planning Development.***

**PENDAHULUAN**

Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas UU No. 32 Tahun 2004, menyebutkan bahwa Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yuridiksi, berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat

istiadat setempat yang diakui dan/atau dibentuk dalam Sistem Pemerintahan Negara Nasional dan berada di kabupaten/kota, sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945. Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah tersebut mengakui adanya otonomi yang dimiliki oleh Desa dan kepada kepala desa dapat diberikan penugasan ataupun pendelegasian dari pemerintah atau pemerintah daerah untuk melaksanakan urusan pemerintahan tertentu. Landasan pemikiran pengaturan mengenai Desa

adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa menjelaskan landasan pemikiran mengaturmengenai desa tersebut yaitu : (1) Keanekaragaman, yang memiliki makna bahwa istilah Desa dapat disesuaikan dengan asal-usul dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat, sehingga penyelenggaraan pemerintahan serta pelaksanaan pembangunan di desa harus menghormati sistem nilai yang berlaku pada masyarakat setempat namun harus tetap mengindahkan sistem nilai bersama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara; (2) Partisipasi, yang memiliki makna bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa harus mewujudkan peran aktif masyarakat agar masyarakat senantiasa memiliki dan turut serta bertanggung jawab terhadap perkembangan kehidupan bersama sebagai sesama warga desa; (3) Otonomi Asli, yang memiliki makna bahwa kewenangan pemerintahan desa dalam mengatur dan mengurus masyarakat setempat didasarkan pada hak asal usul dan nilai-nilai sosial budaya yang terdapat pada masyarakat setempat namun harus diselenggarakan dalam perspektif administrasi pemerintahan Negara yang selalu mengikuti perkembangan zaman; (4) Demokratisasi, yang memiliki makna

bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di desa harus mengakomodasi aspirasi masyarakat yang diartikulasikan dan diintegrasikan melalui Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Lembaga Kemasyarakatan sebagai mitra Pemerintah Desa; (5) Pemberdayaan Masyarakat, yang memiliki makna bahwa penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan pembangunan di desa ditujukan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat melalui penetapan kebijakan, program dan kegiatan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat.

Secara umum dalam melaksanakan tugasnya yaitu membantu Pemerintah Desa dan sebagai mitra dalam memberdayakan masyarakat desa, tugas lembaga kemasyarakatan meliputi menyusun rencana pembangunan secara partisipatif; melaksanakan, mengendalikannya, memanfaatkan, memelihara dan mengembangkan pembangunan secara partisipatif; menggerakkan dan mengembangkan partisipasi, gotong royong dan swadaya masyarakat; menumbuhkembangkan kondisi dinamis masyarakat dalam rangka pemberdayaan masyarakat. Dalam pembangunan desa akan semakin menantang di masa depan dengan kondisi perekonomian daerah yang semakin

terbuka dan kehidupan berpolitik yang lebih demokratis. Akan tetapi desa sampai kini, masih belum beranjak dari profil lama, yakni terbelakang dan miskin. Meskipun banyak pihak mengakui bahwa desa mempunyai peranan yang besar bagi kota, namun tetap saja desa masih dipandang rendah dalam hal ekonomi ataupun yang lainnya. Oleh karena itu, sudah sewajarnya bila pembangunan pedesaan harus menjadi prioritas utama dalam segenap rencana strategi dan kebijakan pembangunan di Indonesia. Jika tidak, maka jurang pemisah antara kota dan desa akan semakin tinggi terutama dalam hal perekonomian.

Pembangunan Masyarakat Desa pada dasarnya adalah bertujuan untuk mencapai suatu keadaan pertumbuhan dan peningkatan untuk jangka panjang dan sifat peningkatan akan lebih bersifat kualitatif terhadap pola hidup warga masyarakat, yaitu pola yang dapat mempengaruhi perkembangan aspek mental (jiwa), fisik (raga), intelegensia (kecerdasan) dan kesadaran bermasyarakat dan bernegara. Salah satu misi yang diusung oleh Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah membangun harmonisasi antara berbagai kutub perencanaan yang ada, yaitu perencanaan teknokratis, perencanaan politis, perencanaan

partisipatif. Muara akhir dari upaya tersebut adalah terakomodirnya aspirasi dan kebutuhan berbagai stakeholders dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran pembangunan.

Hal inipun terjadi di Desa Bitunuris Kecamatan Salibabu Kabupaten Kepulauan Talaud. Oleh sebab itu efektivitas pelaksanaan dari Lembaga Pemberdayaan Masyarakat harus di lihat kembali dan di perjelas.

### **Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut maka masalah penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :  
“Bagaimana efektivitas pelaksanaan tugas LPM dalam perencanaan pembangunan di Desa Bitunuris ?

### **Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Berdasarkan perumusan masalah diatas maka tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui bagaimana efektivitas pelaksanaan tugas LPM dalam perencanaan pembangunan di Desa Bitunuris. Dengan mengetahui bagaimana efektivitas pelaksanaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Dalam Perencanaan Pembanguna di Desa Bitunuris Kecamatan Salibabu Kabupaten Kepulauan Talaud, maka di harapkan

dapat memperoleh manfaat sebagai berikut :

- 1) Secara praktisi, hasil penelitian ini di harapkan dapat menjadi bahan masukan berharga bagi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat di Desa Bitunuris Kecamatan Salibabu Kabupaten Kepulauan Talaud.
- 2) Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi kepada pengembangan ilmu administrasi publik.

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### **Konsep Efektivitas**

Chester Barnard (dalam Gibson dkk, 1998) mendefinisikan efektivitas adalah tingkat pencapaian tujuan/sasaran yang telah ditentukan sebelumnya; dengan kata lain tingkat pencapaiantujuan atau sasaran itulah menunjukkan tingkat efektivitas. Gie, dkk (Ensiklopedi Administrasi, 1990) mengartikan terjadinya sesuatu efek atau akibat yang dikehendaki. Berelson (dalam Handyaningrat, 1992) mengartikan effectivity atau effectiveness sebagai pengukuran dalam arti tercapainya tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

Menurut Gibson dkk (1998), ada dua kesimpulan pokok dari teori sistem tentang kriteria efektivitas organisasi,

yaitu : (1) Kriteria efektivitas organisasi harus menggambarkan seluruh siklus input – proses – output, tidak hanya output saja; dan (2) Kriteria efektivitas organisasi harus menggambarkan hubungan timbal-balik antara organisasi dengan lingkungan yang lebih luas yaitu tempat hidupnya organisasi. Gibson dkk (1998) mengemukakan kriteria untuk menilai/mengukur efektivitas organisasi yaitu : produksi (production), efisiensi (efficiency), kepuasan (satisfaction), adaptasi (adaptiveness), dan perkembangan (development). Produksi, menggambarkan tingkat kemampuan organisasi untuk menghasilkan jumlah dan mutu output yang dibutuhkan lingkungan, misalnya : perbandingan antara hasil kerja dengan biaya atau dengan waktu yang dipergunakan untuk menghasilkan hasil itu. Kepuasan, ialah tingkat seberapa jauh organisasi memenuhi kebutuhan pegawainya. Adaptasi, menggambarkan tingkat sejauh mana organisasi dapat menanggapi perubahan internal dan eksternal. Perkembangan, menggambarkan kemampuan organisasi untuk meningkatkan kapasitasnya menghadapi tuntutan lingkungan; atau tanggung jawab organisasi memperbesar kapasitasnya dan potensinya untuk berkembang atau hidup terus. Menurut Steers (1980) kriteria

umum efektivitas ialah : adaptasi fleksibilitas, produksi, dan kepuasan.

### **Konsep Lembaga Pemberdayaan**

#### **Masyarakat**

Menurut Soedjono Soekanto (1997), lembaga kemasyarakatan adalah himpunan norma-norma atau segala tindakan yang berdasarkan pada suatu kebutuhan pokok manusia, himpunan norma tersebut ada dalam segala tindakan serta mengatur manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Koentjaraningrat (1964), mengatakan bahwa lembaga kemasyarakatan merupakan suatu sistem norma khusus yang menata suatu rangkaian tindakan yang berpola guna memenuhi kebutuhan manusia dalam kehidupan bersama, dimana lembaga kemasyarakatan harus mempunyai sistem norma yang mengatur tindakan yang terpolakan serta tindakannya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan manusia.

#### **Konsep Perencanaan Pembangunan Desa**

Perencanaan menurut Abe (2001) dalam Ovalhanif (2009) adalah susunan (rumusan) sistematis mengenai langkah-langkah mengenai langkah (tindakan-tindakan) yang akan dilakukan di masa depan, dengan didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan yang seksama atas potensi, faktor-faktor eksternal dan pihak-pihak yang

berkepentingan dalam rangka mencapai suatu tujuan tertentu.

#### **Pembangunan**

pertanian dalam arti luas dalam rangka meningkatkan ketersediaan pangan dan meningkatkan pendapatan petani, nelayan dan peternak.

1. Pengembangan dan pemberdayaan koperasi serta pengusaha mikro kecil dan menengah melalui pembinaan pengusaha kecil, pengembangan industri kecil dan pembangunan prasarana dan sarana ekonomi desa.
2. Pengembangan potensi dan pemanfaatan teknologi tepat guna dalam rangka menunjang industri kecil perdesaan.

Pembangunan infrastruktur diharapkan mampu mendukung prioritas pembangunan lainnya, khususnya pengembangan ekonomi kerakyatan dan peningkatan kualitas SDM. Program pembangunan infrastruktur pada dasarnya adalah pembangunan sarana dan prasarana yang mampu memberikan pelayanan guna mendukung kegiatan ekonomi produktif, pelayanan sosial, kegiatan sosial kemasyarakatan dan meningkatkan aksesibilitas untuk

menciptakan keterkaitan ekonomi antar wilayah. Beberapa program yang dapat dikembangkan dalam membangun infrastruktur pedesaan adalah:

1. Membuka isolasi daerah-daerah yang terisolasi dengan pembangunan jalan-jalan pedesaan.
2. Pembangunan prasarana perekonomian dan pertanian
3. Pembangunan prasarana pemerintahan desa/kelurahan.

## **METODOLOGI PENELITIAN**

### **Jenis Penelitian**

Menurut Sugiono (2009), Jenis penelitian dapat dikelompokkan menurut tujuan, pendekatan, tingkat eksplanasi, dan jenis data. Sesuai dengan metode penelitian kualitatif dimana peneliti merupakan instrumen kunci, dan meneliti sesuai konsep objek alamiah.

Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang di gunakan yaitu jenis penelitian kualitatif, dengan fokus penelitian ialah efektivitas pelaksanaan lembaga pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan desa.

Bungin (2010) mengatakan bahwa penelitian bertujuan menggali dan membangun suatu preposisi atau

menjelaskan makna dibalik realita. Dalam penelitian kualitatif, peneliti berpijak dari realitas atau peristiwa yang berlangsung di lapangan.

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian (misalnya perilaku, persepsi, tindakan, dan lainnya), secara holistic, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah (Moleong 2006). Dalam penelitian kualitatif, data dituangkan secara deskriptif dalam bentuk laporan dan uraian (Nasution, 2001).

Berdasarkan pengertian atau makna penelitian kualitatif tersebut, maka dalam penelitian ini peneliti mengembangkan konsep, menghimpun fakta dan menganalisis data, tetapi tidak melakukan pengujian suatu hipotesis. Ini sesuai dengan pendapat para ahli di bidang metodologi penelitian bahwa penelitian yang bersifat kualitatif pada umumnya merupakan penelitian nonhipotesis, sehingga dalam langkah penelitiannya tidak perlu merumuskan atau menguji hipotesis (Arikunto, 2002).

### **Fokus Penelitian dan Definisi Operasional**

Fokus penelitian ini ialah efektivitas pelaksana Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Dalam Perencanaan Pembangunan di Desa Bitunuris Kecamatan Salibabu Kabupaten Kepulauan Talaud. Yang di maksud dengan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Menurut PP No 72 Tahun 2005 adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat.

Secara umum fungsi LPM dalam melaksanakan tugasnya yaitu membantu Pemerintah Desa dan sebagai mitra dalam memberdayakan masyarakat desa, tugas lembaga kemasyarakatan meliputi menyusun rencana pembangunan secara partisipatif; melaksanakan, mengendalikan, memanfaatkan, memelihara dan mengembangkan pembangunan secara partisipatif; menggerakkan dan mengembangkan partisipasi, gotong royong dan swadaya masyarakat; menumbuhkembangkan kondisi dinamis masyarakat dalam rangka pemberdayaan masyarakat yang memiliki makna bahwa pelaksanaan pembangunan di desa ditujukan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat melalui penetapan kebijakan, program dan kegiatan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan

masyarakat. Berdasarkan definisi tersebut maka efektivitas pelaksanaan LPM dalam perencanaan pembangunan desa dapat diamati dari beberapa indikator sebagai berikut :

- a. Komunikasi dan kerjasama antara pemerintah desa dengan LPM di dalam perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan di desa.
- b. Keterpaduan program-program pembangunan yang direncanakan dan dilaksanakan oleh LPM serta pemerintah desa dan masyarakat.
- c. Kejelasan rencana/program pembangunan yang ditetapkan atau dilaksanakan baik dari aspek tujuan dan sarannya maupun aspek kemanfaatannya bagi masyarakat desa.
- d. Tingkat keberhasilan (ketertiban, keterturan, kelancaran) pelaksanaan program pembangunan yang ditetapkan.
- e. Tingkat dukungan partisipasi masyarakat desa dalam pelaksanaan program-

program pembangunan yang ditetapkan.

### **Responden/Instrumen Penelitian**

Sifat dari penelitian kualitatif ialah tidak terlalu mementingkan jumlah informan/responden, tetapi lebih mementingkan content, relevansi, sumber yang benar-benar dapat memberikan informasi, baik mengenai orang, peristiwa, atau hal. Oleh karena itu teknik pengambilan responden/informan yang digunakan dalam penelitian ini ialah teknik purposive sampling atau pengambilan sampel bertujuan.

Yang menjadi responden/instrumen dalam penelitian ini ialah pejabat daerah dan masyarakat Desa Bitunuris Kecamatan Salibabu Kabupaten Kepulauan Talaud sebanyak 13 orang, dengan rincian sebagai berikut:

1. Unsur Pemerintah Desa : 3 orang
2. LPM : 3 orang
3. Unsur organisasi sosial/kemasyarakatan : 2 orang
4. Unsur Tokoh Masyarakat/Agama/Adat : 2 orang
5. Warga masyarakat desa : 3 orang

### **Instrumen dan Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini ialah sebagai berikut :

1. Wawancara (Interview). Teknik wawancara ini digunakan untuk memperoleh data primer dari responden/informan. Wawancara dilakukan dengan dua cara yaitu wawancara dengan menggunakan pedoman (interview guide), dan wawancara secara mendalam (indepth interview).
2. Dokumentasi. Teknik dokumentasi ini digunakan untuk memperoleh data sekunder yaitu data yang telah terolah atau tersedia di BKDD Kabupaten Kepulauan Talaud.
3. Observasi. Teknik observasi ini digunakan untuk mengamati secara langsung peristiwa/fenomena yang diteliti.

### **Teknik Analisis Data**

Sesuai dengan jenis penelitian ini yang merupakan penelitian kualitatif, maka teknik analisis data yang digunakan ialah analisis kualitatif. Dalam hal ini metode atau teknik analisis data yang digunakan ialah model analisis interaktif (Miles dan Huberman dalam Rohidi dan Mulyarto, 2002).

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, maka sesuai dengan penelitian ini teknik analisis data ialah analisis deskriptif kualitatif.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **Hasil Penelitian**

Sebagaimana telah dikemukakan dalam uraian pada bab metodologi penelitian di atas bahwa efektivitas pelaksanaan tugas LPM dalam perencanaan pembangunan desa Bitunuris dilihat/diamati dalam 5 (lima) indikator yaitu : (1) Komunikasi dan kerjasama antara pemerintah desa dengan LPM di dalam perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan di desa; (2) Keterpaduan program-program pembangunan yang direncanakan dan dilaksanakan oleh LPM serta pemerintah desa dan masyarakat; (3) Kejelasan rencana/program pembangunan yang ditetapkan/dilaksanakan baik dari aspek tujuan dan sasarannya maupun aspek kemanfaatannya bagi masyarakat desa; (4) Tingkat keberhasilan (ketertiban, keteraturan, kelancaran) pelaksanaan program pembangunan yang ditetapkan; (5) Tingkat dukungan partisipasi masyarakat desa dalam pelaksanaan program-program pembangunan yang ditetapkan.

Responden dalam penelitian ini sebanyak 13 orang yang diambil dari berbagai unsur yang terkait dengan pelaksanaan tugas LPM dalam pembangunan desa yaitu Pemerintah Desa, LPM, dan unsur masyarakat (organisasi/kelompok sosial kemasyarakatan, tokoh-tokoh masyarakat).

### **Pembahasan Hasil Penelitian**

Prijono dan Pranarka, (1996) menyatakan bahwa pemberdayaan mempunyai dua makna, yakni mengembangkan, memandirikan, menswadayakan dan memperkuat posisi tawar menawar masyarakat lapisan bawah terhadap kekuatan-kekuatan penekan di segala bidang dan sektor kehidupan. Sebagai wadah aspirasi masyarakat, LPM harus peka terhadap berbagai ketimpangan-ketimbangan dan kebutuhan-kebutuhan yang ada di dalam masyarakat. Apalagi sistem pembangunan yang ada di desa dan negara yang bernafaskan dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat menjadi roh tersendiri dalam pelaksanaan tugas dan fungsi LPM.

Penelitian ini menemukan bahwa efektivitas pelaksanaan tugas LPM dalam perencanaan pembangunan desa ditunjukkan oleh beberapa indikator yaitu :

- a) Adanya komunikasi antara LPM dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan serta dengan organisasi-organisasi masyarakat yang ada di desa di dalam perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan desa. Walaupun belum sepenuhnya maksimal, komunikasi LPM dengan pemerintah desa bahkan unsur-unsur terkait yang terkait dengan perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan desa sudah dapat diwujudkan dengan cukup baik.
- b) Adanya keterpaduan program-program pembangunan desa yang ditetapkan dan dilaksanakan. Program-program pembangunan desa yang ditetapkan sudah saling berhubungan dan saling mendukung satu dengan yang lainnya. Pelaksanaan program-program pembangunan desa sudah cukup terpadu atau tidak saling tumpang tindih satu dengan yang lainnya.
- c) Adanya kejelasan tujuan/sasaran dan manfaat program-program pembangunan desa yang ditetapkan. Tujuan/sasaran program pembangunan desa yang ditetapkan jelas. Demikian pula

manfaat program pembangunan desa yang ditetapkan bagi masyarakat desa selalu jelas.

- d) Adanya keberhasilan (ketertiban, keteraturan dan kelancaran) pelaksanaan program-program pembangunan desa secara partisipatif yang ditetapkan
- e) Adanya dukungan partisipasi masyarakat yang terhadap pelaksanaan program-program pembangunan desa yang ditetapkan.

Hasil penelitian tersebut secara keseluruhan menunjukkan bahwa efektivitas pelaksanaan tugas LPM dalam perencanaan pembangunan desa Bitunuris Kecamatan Salibabu Kabupaten kepulauan Talaud adalah cukup baik; dengan kata lain bahwa tugas LPM dalam mengkoordinasikan pembangunan di desa sudah dilaksanakan dengan cukup efektif dilihat dari lima indikator yang dipergunakan dalam penelitian ini.

Sumber Daya merupakan unsur lingkungan hidup yang terdiri atas sumber daya manusia, sumber daya alam hayati, sumber daya alam nonhayati, dan sumber daya buatan (Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1982). Dengan demikian, semua sumber daya baik manusia, materi maupun energi yang secara nyata dan potensial dapat

digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan manusia.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **Kesimpulan**

Tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui bagaimana efektivitas pelaksanaan tugas LPM dalam perencanaan pembangunan di desa Bitunuris Kecamatan Salibabu Kabupaten Kepulauan Talaud. Sesuai dengan indikator pengamatan dan pengukuran yang digunakan diperoleh hasil penelitian sebagai berikut :

1. Komunikasi LPM dengan pemerintah desa serta unsur-unsur lain dalam masyarakat (organisasi-organisasi sosial/kemasyarakatan) yang terkait dengan perencanaan pembangunan di desa adalah cukup baik.
2. Keterpaduan program-program perencanaan pembangunan yang dilaksanakan di desa adalah cukup baik;
3. Kejelasan tujuan/sasaran dan kemanfaatan program pembangunan desa secara partisipatif yang ditetapkan/dilaksanakan adalah cukup tinggi/baik;

4. Tingkat keberhasilan (ketertiban, keteraturan, kelancaran) pelaksanaan program-program pembangunan desa adalah sudah cukup baik.
5. Dukungan partisipasi masyarakat terhadap pelaksanaan program-program pembangunan desa adalah cukup baik.

### **Saran**

Bertolak dari kesimpulan hasil penelitian tersebut maka perlu direkomendasikan saran sebagai berikut :

1. Untuk meningkatkan dan mengoptimalkan efektivitas LPM dalam perencanaan pembangunan desa, maka forum koordinasi pembangunan di tingkat desa harus berfungsi dengan baik dan efektif.
2. Lebih meningkatkan sumberdaya yang ada baik sumberdaya manusia maupun sumberdaya alam agar perencanaan pembangunan dapat dilaksanakan dengan lebih baik lagi.

## DAFTAR PUSTAKA

Arikunto Suharsimi, 2002, *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktif*, Jakarta, Rineka Cipta.

Bungin, B.M., 2010, *Penelitian Kualitatif*, Jakarta, PT. Kencana.

Moleong, L. J., 2006, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung, PT. Remaja Rosdakarya.

Nasution, 2001, *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*, Bandung, Tarsito.

Steers, R. 1980, *Efektivitas Organisasi*, Alumni, Bandung.

Singarimbun, M. Dan Sofian Effendy, 1992, *Metode Penelitian Survei*, Jakarta, LP3ES.

Westra Pariata, 1982, *Manajemen Pembangunan Daerah*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

### Sumber Lain

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa.

UU. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup.